

PEJABAT
PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
(PPID)

**LAPORAN
TAHUNAN**

PPID BALAI BESAR
PENGEMBANGAN MEKANISASI
PERTANIAN

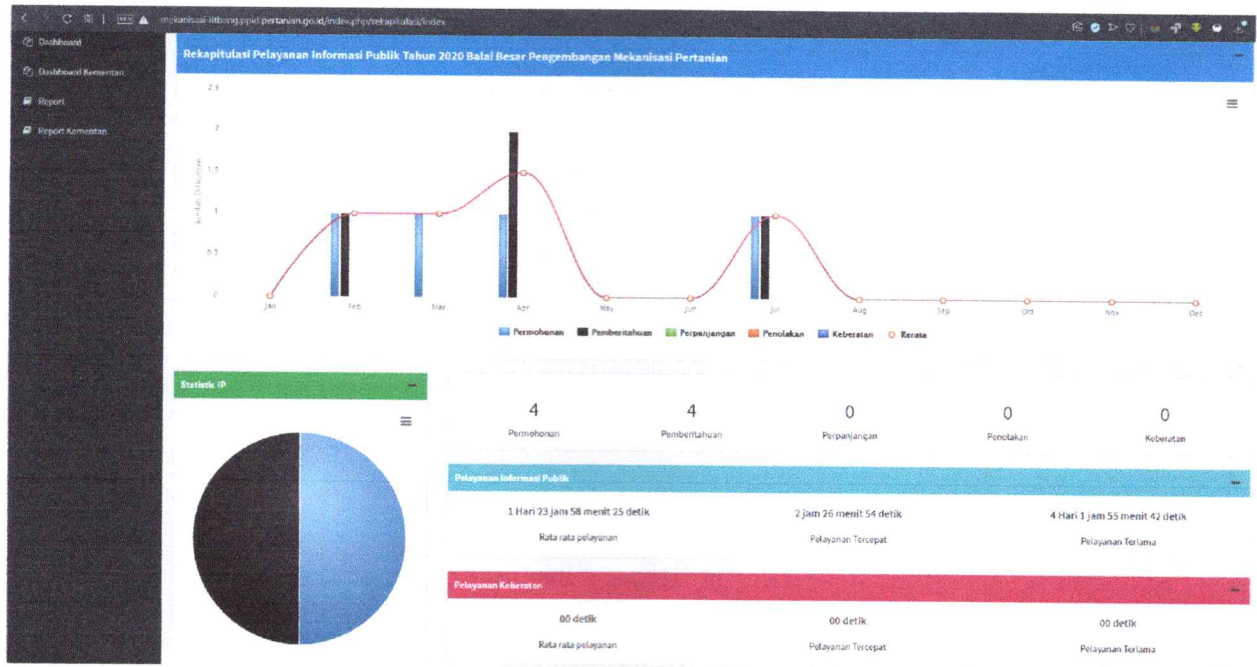


**BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2020**

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN, TANGERANG TAHUN 2020

I. Rekapitulasi Permohonan (jumlah informasi publik dalam 1 tahun)



Gambar 1. Grafik rekapitulasi informasi publik BBP Mektan bulan Januari – Desember 2020

II. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik (pelayanan tercepat, pelayanan terlama & rata-rata pelayanan)

PPID

Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian

Report Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian

Filter Laporan

Periode

2020-01-01

2020-12-31

Jenis Laporan

Buat Laporan

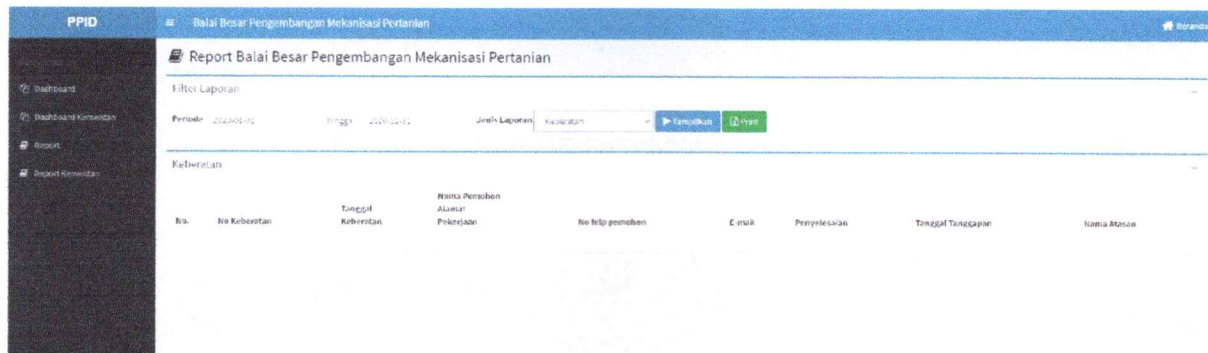
Buat Print

Waktu Pelayanan Informasi Publik

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
1	January	0	0	0	0	0	0
2	February	1	1	0	0	0	0
3	March	0	0	0	0	0	0
4	April	2	1	0	1	0	0
5	May	0	0	0	0	0	0
6	June	0	0	0	0	0	0
7	July	1	1	0	0	0	0
8	August	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	October	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0
12	December	0	0	0	0	0	0
Total		1	2	0	1	0	0

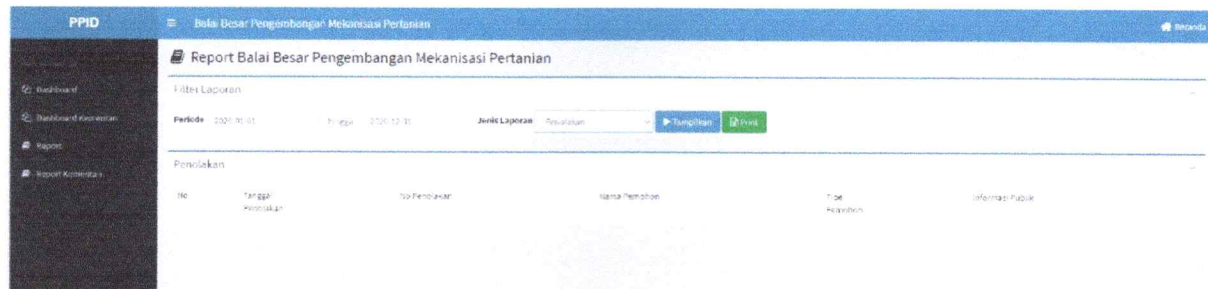
Gambar 2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik BBP Mektan bulan Januari – Desember 2020

III. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan beserta Alasan Pengajuan Keberatan



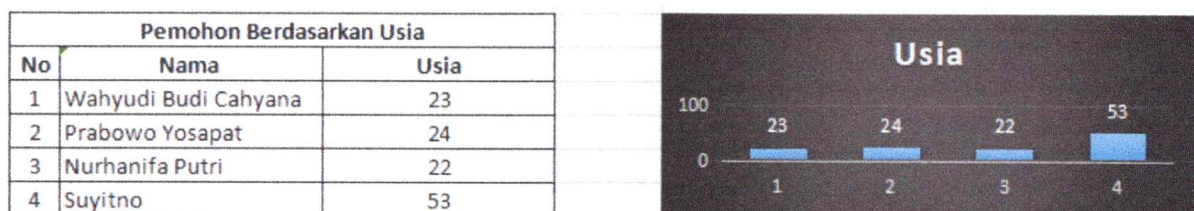
Gambar 3. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan beserta Alasan Pengajuan Keberatan Informasi Publik BBP Mektan bulan Januari – Desember 2020

IV. Rekapitulasi Permohonan yang ditolak beserta Alasan Penolakan



Gambar 4. Rekapitulasi Permohonan yang ditolak beserta Alasan Penolakan Informasi Publik BBP Mektan bulan Januari – Desember 2020

V. Jumlah pemohon berdasarkan usia



Gambar 5. Rekapitulasi Jumlah pemohon berdasarkan usia bulan Januari – Desember 2020

Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan

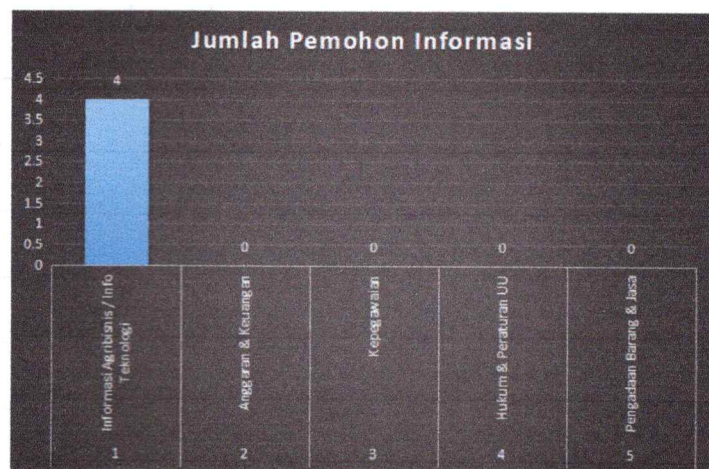
Pemohon Berdasarkan Pekerjaan		
No	Nama	Pekerjaan
1	Wahyudi Budi Cahyana	Mahasiswa
2	Prabowo Yosapat	Mahasiswa
3	Nurhanifa Putri	Mahasiswa
4	Suyitno	Karyawan
Total		
	Mahasiswa	3
	Karyawan	1



Gambar 6. Rekapitulasi Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan bulan Januari – Desember 2020

VI. Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan kategori pengelompokan

Permohonan Informasi Publik		
No	Kategori Pengelompokan	Jumlah Pemohon Informasi
1	Informasi Agribisnis / Info Teknologi	4
2	Anggaran & Keuangan	0
3	Kepegawaian	0
4	Hukum & Peraturan UU	0
5	Pengadaan Barang & Jasa	0



Gambar 7. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan kategori pengelompokan bulan Januari – Desember 2020

VII. Motto dan Maklumat Layanan PPID

Motto : MENGHASILKAN PRODUK BERMUTU TINGGI DAN BERDAYA SAING

Maklumat Layanan : "Dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".

VIII. Sekilas PPID BBP Mektan

Tim PPID BBP Mektan dibentuk berdasarkan SK Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Nomor : 38/Kpts/OT.080/H.9/01/2020, tanggal 2 Januari 2020, tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

Pelaksana lingkup Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian. Tugas pejabat PPID meliputi:

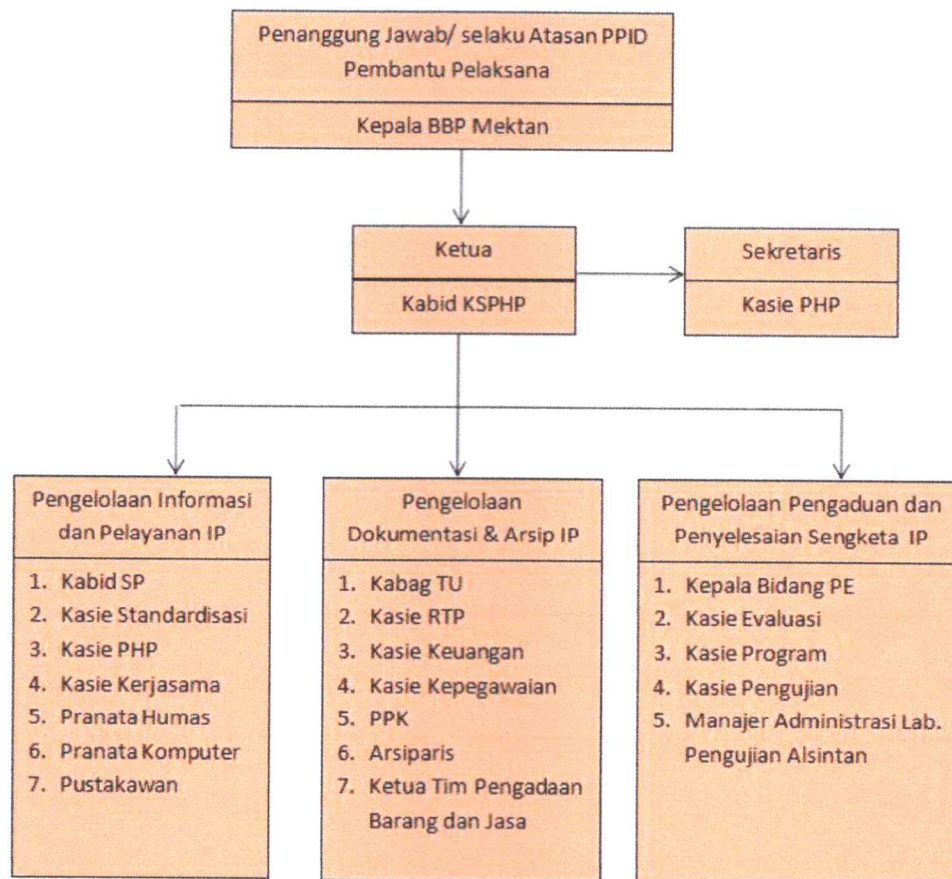
- Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab lingkup BBP Mektan;
- Menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup BBP Mektan;
- Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- Menyiapkan bahan klasifikasi;
- Menyusun laporan (bulanan dan tahunan) secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I Badan Litbang Pertanian dan tembusan kepada PPID Utama kementerian Pertanian;
- Menyusun organisasi dan Tata Kerja serta SOP Pelayanan PPID;
- Menjamin terselenggaranya pelayanan PPID secara operasional di lingkup BBP Mektan;
- Menyediakan akses Informasi bagi Pemohon Informasi;

Adapun fungsi pejabat PPID adalah bertanggung jawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan BBP Mektan.

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, BBP Mektan telah menetapkan visi dan misi. Visi yang telah ditetapkan adalah terwujudnya pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun visi yang telah ditetapkan adalah : 1) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab; 2) meningkatkan dan mengembangkan kompetensi SDM dalam bidang pelayanan publik; serta 3) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan informasi publik.

Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian sebagai salah satu Badan Publik di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan informasi publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komitmen tersebut tercermin dengan telah ditanda tangannya komitmen pengelolaan KIP oleh semua Pejabat PPID serta tenaga pendukung dalam pengelolaan layanan informasi publik, serta ditetapkannya SK Kepala Balai Besar tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu pelaksana lingkup BBP Mektan, dukungan sarana dan prasarana, petugas pelaksana layanan, serta penganggaran untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik di BBP Mektan.

Dalam pengelolaan PPID BBP Mektan menetapkan struktur organisasi seperti berikut :



Gambar 8. Struktur Organisasi PPID BBP Mektan

Adapun cara memperoleh informasi publik lingkup Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian adalah sebagai berikut :

- Melalui Website atau Email dapat mengunduh informasi publik yang tersedia pada website : <http://www.mekanisasi.litbang.pertanian.go.id> atau melalui email dengan alamat : bbpmektan@litbang.pertanian.go.id atau bbpmektan@gmail.com atau layanan.mektan@gmail.com
- Melalui portal PPID BBP Mektan, dengan mengakses ke : www.mekanisasi-litbang.ppid.pertanian.go.id
- Melalui Telephone : dapat menghubungi 021-75675918
- Mengirimkan surat melalui jasa pos yang ditujukan kepada Pejabat PPID Pembantu Pelaksana BBP Mektan, dengan alamat Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Jl. Sinarmas Bouevard, Pagedangan, Tangerang, Banten 15338
- Datang langsung : datang langsung ke desk layanan informasi, dengan alamat Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Jl. Sinarmas Boulevard, Pagedangan, Tangerang, Banten 15338

IX. Program dan Kegiatan Kerja PPID BBP Mektan

Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian dalam memberikan layanan informasi publik, salah satunya adalah dengan menggunakan sistem informasi berbasis web. Informasi publik yang wajib disajikan lewat web yang dikelompokkan menjadi 3 yaitu : 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (sekali dalam enam bulan) meliputi : profil, sejarah singkat, struktur organisasi, program kerja, laporan tahunan, serta laporan LAKIP; 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (informasi tentang kondisi darurat, informasi tentang covid-a9 dan lainnya); serta 3) Informasi yang wajib disediakan setiap saat meliputi : daftar informasi publik, prosedur kerja dan rencana kerja BBP Mektan.

Dengan adanya informasi publik yang lengkap serta mudah diakses diharapkan masyarakat/stakeholder dapat dengan mudah mengetahui tentang tugas dan fungsi balai, struktur organisasi, program kerja, anggaran dan informasi lainnya, sehingga informasi keterbukaan publik bisa terlaksana. Selain informasi tersebut, BBP Mektan juga melakukan kegiatan pelayanan publik dalam bentuk email, telepon dan kunjungan secara langsung, serta melalui portal PPID.

The screenshot displays the BBP Mektan website with a green header and navigation menu. The main content is organized into three sections: A, B, and C.

Section A: INFORMASI TENTANG PROFIL BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN

No	Informasi	Lihat
1	Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak	Lihat
2	Struktur Organisasi	Lihat
3	Gambaran umum satker	Lihat
4	Profil singkat pejabat struktural	Lihat
5	Tugas dan fungsi	Lihat
6	Visi dan misi	Lihat
7	Laporan Harita Kekayaan bagi Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah didaftarkan oleh KPK ke badan publik untuk diumumkan	Lihat

Section B: RINGKASAN INFORMASI TENTANG PROGRAM DAN/ATAU KEGIATAN YANG SEDANG DIJALANKAN DALAM LINGKUP BADAN PUBLIK

No	Informasi	Lihat
1	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	Lihat
2	Judul Penelitian/Perekayasaan	Lihat
3	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik	Lihat
4	Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat	Lihat

Section C: RINGKASAN INFORMASI TENTANG KINERJA DALAM LINGKUP BADAN PUBLIK BERUPA NARASI TENTANG REALISASI KEGIATAN YANG TELAH MAUPUN SEDANG DIJALANKAN BERSERTA CAPAIANNYA

No	Informasi	Tahun
1	LAKIP / LAKIN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja BBP Mektan dalam mendukung pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan SK Kepala LAN No. 239/DX/6/2003 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP dan Permen PAN-RB No. 29/2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan LAKIP.	• 2017 • 2018 • 2019 • Selengkapnya...
2	LAPORAN TAHUNAN Laporan tahunan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Institusi terhadap berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun, serta memberikan informasi secara umum sesuai tugas	• 2017 • 2018 • 2019

KOLOM DOWNLOAD

- Informasi PUBLIK
- Jurnal Engineering Pertanian
- Makalah-Seminar
- Makalah Presentasi
- Artikel
- Leaflet
- Aduks
- Buku Panduan
- Info Lembangan

POLLING

Darimanakah Anda Mengetahui BBP Mektan ?

☒ Website / Internet

☐ Facebook / Twitter

☐ Youtube / Instagram

☐ Seminar / Lokakarya

☐ Poster / Leaflet

[Submit](#)

FAQ

Q : Apa yang dimaksud dengan Mekanisasi Pertanian?

Q : Mengapa harus menggunakan Mekanisasi Pertanian, Apa tujuannya?

Q : Apa saja Jenis Pengujiannya?

Q : Bagaimana prosedur dan persyaratan pengujian alat dan mesin pertanian

[Selengkapnya...](#)

Gambar 9. Informasi Publik yang telah dipublish dalam Web BBP Mektan

Selain itu juga dilakukan pengembangan sistem informasi untuk mendukung layanan informasi publik meliputi : Sistem Informasi Kegiatan BBP Mektan, sistem informasi hasil penelitian alat dan mesin pertanian, sistem informasi pengelolaan Dumas, serta Pengelolaan Perpustakaan sistem Barcode.

10.1. Pelaksanaan kegiatan Internal BBP Mektan

Pelaksanaan kegiatan informasi publik yang dilakukan BBP Mektan selain menyelenggarakan acara internal juga mengikuti acara yang dilakukan PPID Utama

Kegiatan internal bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan pelayanan publik agar terjalin komitmen antar pengelola PPID dan pimpinan unit serta meningkatkan kapasitas petugas layanan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Hasil kegiatan internal adalah sebagai berikut :

10.1.1. Partisipasi dalam lomba abdi Bhakti Tani tahun 2020

Balai Besar Pengembangan mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) sesuai surat dari Sekretaris Badan Litbang Pertanian nomor : B-309/OT.080/H.1/2020, tanggal 31 Januari 2020, maka BBP Mektan sebagai salah satu eselon 2 lingkup BBP Mektan ditunjuk untuk mengikuti lomba penghargaan abidibaktitani kepada Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Kementerian Pertanian tahun 2020 mewakili Badan Litbang Pertanian.

Dokumen pendukung sebagai persyaratan lomba telah BBP Mektan kepada Sekretariat Badan Litbang Pertanian pada tanggal 20 Juli 2020, selanjutnya akan diteruskan kepada Sekjen Kementerian Pertanian. Tahapan dalam penilaian UKPP berprestasi bidang pertanian meliputi : 1) seleksi administrative yang dilakukan berupa penilaian tahap 1 oleh eselon 1 masing-masing, selanjutnya oleh eselon 1 lingkup Kementan. Dilanjutkan penilaian tahap 2 oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan, dilanjutkan penilaian tahap 3 oleh Tim Penilai Kementan. 2) Penilaian lapangan. Penilaian Lapangan merupakan rangkaian kegiatan penilaian kepada calon UKPP Berprestasi Bidang Pertanian untuk melakukan verifikasi data/informasi yang diperlukan dalam penilaian. Pelaksanaan penilaian dilakukan secara terbuka dan objektif oleh Tim Penilai dan pemangku kepentingan.

Langkah-langkah penilaian merupakan sebagai berikut:

- a. Melakukan observasi yaitu kunjungan *pengamatan* pada calon UKPP Berprestasi Bidang Pertanian yang akan mendapat penghargaan dengan melakukan identifikasi semua komponen pelayanan yang dinilai. Selain itu juga memberikan *assesment* terhadap kinerja pelayanannya.

- b. Melakukan wawancara mendalam dengan pimpinan UKPP dan atau pihak lain yang memiliki keterkaitan. Mencari data/informasi dari sumber sekunder baik berupa pendapat, laporan, pengaduan dan temuan-temuan lain.

Berdasarkan seleksi administrasi BBP Mektan telah lolos, selanjutnya ikut tahap selanjutnya yaitu presentasi tentang hasil kinerja BBP Mektan oleh Kepala Unit kerja pada tanggal 29 September 2020. Presentasi ini menggantikan penilaian lapang oleh tim juri disebabkan adanya pandemi corona. Hasil penilaian akan segera diumumkan setelah hasil penilaian telah ditetapkan oleh tim penilai.

10.1.2. Partisipasi dalam lomba Sinovik Tahun 2020

Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD tahun 2020 didasarkan pada peraturan Menteri PANRB nomor : 44 tahun 2020.

Tujuan kompetensi inovasi pelayanan publik adalah : 1) menjangring, mendokumentasikan, mendiseminasikan dan mempromosikan inovasi sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik; 2) memberikan apresiasi dan penghargaan bagi penyelenggara pelayanan publik yang inovasinya ditetapkan sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik; 3) memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan inovasi dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik; 4) meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik; 5) menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran dalam rangka pengembangan Sistem JIPP Nasional.

BBP Mektan pada kompetisi ini mengajukan proposal tentang aplikasi layanan UPJA Smart Mobile yang sangat bermanfaat untuk pengelolaan UPJA sehingga konsumen memudahkan apabila menginginkan layanan sewa alsintan ataupun layanan lainnya.

Pada kompetsisi ini BBP Mektan hanya lolos pada tahap1 yaitu tahap administratif namun belum bisa masuk dalam tahap selanjutnya. Semoga ke depan lebih baik lagi, diutamakan agar ada pendampingan tim ahli untuk memandu bagaimana membuat proposal, agar mudah dipahami oleh semua pihak.

10.1.3. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik via Vidcon, tanggal 14 Mei 2020

Pertemuan monev dibuka oleh Kepala BBP Mektan, dihadiri seluruh tim PPID, petugas layanan serta staf bidang KSPHP. Hadir pula narasumber dari Biro HIP yaitu Kabag Umum Pengelolaan Informasi Publik, Komarudin, yang menyampaikan pengantar dan arahan terkait keterbukaan informasi publik menuju pertanian maju, mandiri dan modern.

Kasubbag Pelayanan Informasi dan Multimedia, Wahyu Indarto menyampaikan pengantar tentang pengelolaan portal PPID, serta Pranata Humas sekaligus LO eselon 1, Badan Litbang Pertanian Nadya Novialtsani F, yang menyampaikan review hasil monev terhadap hasil penilaian SAQ tahun 2019, pengelolaan website dan portal PPID.

Tujuan monev untuk : a) untuk mendapatkan gambaran secara riil bagaimana pengelolaan pelayanan publik di BBP Mektan, khususnya dalam pengelolaan website dan portal PPID BBP Mektan sehingga dapat diketahui kekuarangan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depan. b) persiapan lomba pemeringkatan Badan Publik TA. 2020.

Arahan Kepala Balai Besar : a) kegiatan monev ini diharapkan bisa mendapatkan gambaran secara riil bagaimana pengelolaan pelayanan publik di BBP Mektan, sehingga dapat diketahui kekuarangan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depan. b) Biro HIP diharapkan dapat selalu melakukan pendampingan agar pengelolaan pelayanan publik di BBP Mektan dapat menjadi Badan Publik yang Informatif. d) PPID BBP Mektan harus selalu menjalin komunikasi agar tidak terjadi salah persepsi dalam pengelolaan pelayanan informasi publik, d) Tim PPID BBP Mektan agar selalu berkomitmen untuk mendukung kegiatan pengelolaan IP sesuai bidang tugasnya masing-masing, serta e) apabila ada undangan dari Biro HIP dapat selalu mengirimkan pejabat PPID untuk hadir, bila memungkinkan Kepala Balai Besar akan ikut hadir.

Pengantar Kabag Umum Pengelolaan Informasi Publik, Komarudin : sesuai roadmap KIP 2020-2024, maka kewajiban UK/UPT dalam pengelolaan informasi publik meliputi : a) Komitmen dari pimpinan tertinggi dan pejabat PPID, b) adanya SK PPID dan SK petugas layanan PPID, c) teralokasinya anggaran dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara berkala/ setiap tahunnya, d) sarana prasarana gedung yang memadai (petunjuk arah, jalur evakuasi, titik kumpul, sarana untuk disabilitas, ruang laktasi dan *counter* layanan/ruang konsultasi PPID) serta adanya layar panel informasi terhubung AWR, e) menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) minimal 1 tahun 2 kali, f) Laporan Tahunan PPID, serta g) menyusun Laporan Bulanan akses informasi PPID yang disahkan oleh Kepala Balai.

Bedasarkan hasil evaluasi tahun 2019 BBP Mektan mendapatkan nilai : web 78,67; SAQ 92; Portal PPID 70; Lap Bulanan 0; Lap Tahunan 100; Kehadiran 50 jadi total Nilai 73,72; dengan peringkat 9 dari 52 eselon II lingkup Kementan. Strategi menjadi badan informative maka perlu : komitmen, koordinasi dan pelaporan harus tepat waktu. Waktu pemeringkatan akan dimulai bulan Juni 2020.

Pengantar Kasubbag Pelayanan Informasi dan Multimedia, Wahyu Indarto menyampaikan bahwa Portal PPID merupakan aplikasi layanan secara online bagi pemohon

informasi dimana setiap unit kerja akan terhubung langsung ke eselon 1 masing-masing dan Kementan (Biro HIP). Hal-hal penting yang harus segera dilengkapi/perbaiki sebagai indikator penilaian meliputi : a) tiap UK/UPT wajib mengupdate informasi publik pada portal PPID khususnya transparansi kinerja, b) parameter pemeringkatan badan publik didasarkan pada isian SAQ dan portal PPID sehingga data dan sarana harus dilengkapi, c) penilaian yang mendapatkan poin besar dan sering dilupakan adalah komitmen pimpinan untuk bersedia hadir pada setiap pertemuan serta koordinasi yang baik antara BBP Mektan dan Biro HIP, dalam pengelolaan pelayanan informasi publik, d) updating informasi untuk informasi yang wajib diupload terutama di website maka wajib diupload tanpa terkecuali, e) di portal PPID tersedia google drive (database dokumen) server di pusdatin : UK/UPT dapat memanfaatkan untuk menyimpan data yang tidak wajib di upload di web, sehingga memudahkan penyimpanan dokumen, f) apabila UK/UPT ada informasi yang dikecualikan maka wajib mengajukan terlebih dahulu ke Komisi Informasi melalui eselon 1 terkait dan Biro HIP, selanjutnya akan diuji konsekuensi dan ditetapkan dalam bentuk keputusan berupa Informasi yang dikecualikan.

Hasil monev oleh Nadya Novialtsani meliputi : a) pengelolaan pelayanan informasi publik BBP Mektan melalui website dan portal PPID menunjukkan bahwa pengelolaan pelayanan publik sudah cukup baik, tinggal perlu ditingkatkan lagi, namun penting yang harus dilakukan adalah selalu berkomunikasi dan berdiskusi dengan Biro HIP apabila ada kendala atau permasalahan sehingga dapat segera didampingi untuk langkah perbaikannya. b) Hasil monev direview berdasarkan hasil monev yang dilakukan Biro HIP mengacu pada hasil penilaian *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) dalam rangka pemeringkatan Badan Publik 2019, pengelolaan website serta transparansi kinerja pada Portal PPID BBP Mektan. c) Kekurangan dari website : dalam pencarian informasi tidak langsung ketemu/ diakses al. LHKPN; identitas website kurang (nama balai kurang lengkap, nama kepanjangan wajib ditulis lengkap); menu sejarah wajib ditampilkan secara langsung; struktur organisasi dibuat terpisah dari sejarah; penjelasan dari satuan kerja di web perlu diperbaiki sesuai permentan dan fasilitas yang ada apa saja; profil pimpinan dan SDM perlu diperbaiki terutama isian "tentang saya" biar tidak terkesan sama; Daftar Rancangan Peraturan Perundangan & Dokumen. d) Peraturan perundangan/regulasi bisa berupa SK Internal saja yang disahkan oleh Ka BB/ PPK; Laporan Arus Kas; Dokumen pendukung hasil penelitian/ telaah ilmiah sebagai informasi setiap saat (bisa proposal, laporan akhir kegiatan, notulen rapat) data bisa di upload database portal PPID; di laporan keuangan bisa hanya ditampilkan ringkasan laporan keuangan saja. e) Informasi yang masuk kategori serta merta antara lain : peringatan dini, kekeringan, gempa bumi, wabah corona (bantuan2 untuk korona) perlu

dilengkapi/ tidak boleh kosong). Serta f) Untuk cara pengisian apabila ada yang kurang dipahami agar segera berkonsultasi dengan LO BBP Mektan, dari Biro HIP, Kementan.

Hasil diskusi maka didapatkan masukan-masukan yaitu : a) perlu dipilah lagi pengelompokkan dokumen sesuai klasifikasi informasi (setiap saat (wajib dibuka apabila ada publik yang minta), serta merta, serta berkala (wajib diupload). RKAKL tidak perlu diupload di website, cukup disediakan disimpan di google drive/ database dokumen, apabila ada permintaan data/ dokumen RKAKL baru diberikan linknya. Perlu membedakan antara informasi dan dokumen. b) Perlu adanya database dokumen informasi PPID/ informasi lainnya dari setiap bidang di BBP Mektan agar memudahkan apabila ada pencarian informasi/ dokumen. c) Permohonan informasi perlu dipilah masuk kategori biasa atau PPID. Apabila meminta dokumen maka masuk kategori PPID. Tim PPID harus bisa memilah informasi masuk kategori apa. d) Untuk berita hanya dinilai berdasarkan waktu update bukan isi berita. e) Penilaian tidak berdasarkan banyak/sedikitnya permohonan informasi dari portal PPID. f) Apabila ada mahasiswa meminta dokumen untuk penelitian maka masuk kategori informasi PPID. g) Dalam pengelolaan PPID BBP Mektan, perlu dukungan dan komitmen dari semua bidang dalam pengelolaan PPID, tahun 2020 BBP Mektan diharapkan masuk kategori sebagai unit kerja yang informatif. h) Perlu penambahan fasilitas di gedung utama yang baru selesai direnovasi : penunjuk arah fasilitas, sarana fasilitas disabilitas (kursi roda), jalur evakuasi (di BBP Mektan tidak ada cuma ada 1 pintu masuk utama), peta evakuasi darurat. Di ruang laktasi perlu disediakan sofa & kursi, kulkas, arah toilet untuk cuci tangan, penyimpanan barang. Fasilitas sarana lainnya perlu dicek kembali untuk persiapan penilaian tahun 2020.

Pada menu transparansi kinerja di portal PPID BBP Mektan yang belum di lengkapi meliputi : a) Laporan Keuangan tahun 2010 & tahun 2019 : PJ informasi (Sub Bid keuangan. b) RKT tahun 2010 – 2012 : PJ informasi (Sek Evaluasi).

BBP Mektan segera akan melakukan penandatanganan komitmen antar pejabat PPID BBP Mektan dan disaksikan secara online oleh Biro HIP sebelum penilaian lomba KIP tahun 2020.



Gambar 10. Pelaksanaan kegiatan Monev Pengelolaan PPID lingkup BBP Mektan

10.1.4. Penanda Tangan Komitmen Mendukung KIP

Keterbukaan Informasi menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan Good Governance dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabilitas.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pelayanan yang informatif perlu adanya kesepakatan dalam pelaksanaannya. Segenap pimpinan, pejabat dan pengelola PPID BBP Mektan melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik, bertempat di ruang meeting Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan).

Salah satu kewajiban badan publik untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik adalah menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai dan memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan standar penyelenggaraan pelayanan publik, hal ini tercantum dalam UU Nomor 25 tahun 2009 pasal 15 tentang kewajiban penyelenggara publik.

"Penandatanganan komitmen bersama ini diharapkan dapat meningkatkan semangat BBP Mektan untuk menjadi badan publik yang informatif.



Gambar 11. Pelaksanaan kegiatan Penandatanganan Komitmen KIP lingkup BBP Mektan

10.1.5. Partisipasi dalam lomba Pemeringkatan KIP tahun 2020

Latar belakang pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah untuk membuka akses sebesar-besarnya sesuai UU nomor 14 tahun 2008; monitoring dan evaluasi penyediaan informasi publik UKUPT lingkup Kementan melalui Website dan Portal PPID, memberikan dorongan untuk meningkatkan kualitas website dan porta PPID; menjadikan website dan portal PPID sebagai situs acuan utama dalam pencarian informasi publik oleh masyarakat; serta memberikan apresiasi UK/UPT yang telah berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Kriteria penilaian meliputi : penilaian mandiri melalui SAQ; keterbukaan informasi publik melalui website; optimalisasi penggunaan porta PPID; komitmen pimpinan UK/UPT dan PPID serta presentasi.

Rapat pleno untuk penentuan 10 besar eselon 2, telah diumumkan pada tanggal 14 Juli 2020 dan BBP Mektan masuk dalam 10 besar terbaik dalam pengelolaan KIP. Tahap selanjutnya adalah membuat video profil PPID sebagai bahan penilaian bagaimana dalam pengelolaan informasi publik pada setiap unit kerja; dan tahap akhir adalah presentasi dan wawancara yang harus disampaikan oleh Kepala Unit Kerja sebagai bukti komitmen mendukung Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pada kegiatan ini BBP Mektan mendapatkan penghargaan peringkat IV dalam pengeolaan KIP serta sebagai eselon II dengan kolaborasi dan penyebaran informasi publik terbaik lingkup Kementan.

10.2. Pelaksanaan kegiatan Eksternal BBP Mektan

10.2.1. Partisipasi dalam Bimtek PPID, tanggal 27-28 Februari 2020, di Bogor

Workshop dibuka oleh Kepala Biro HIP, serta menghadirkan narasumber Kepala Pusdatin dan Komisi Informasi Pusat. Kepala Pusdatin menyampaikan materi tentang inovasi pelayanan publik mendukung pertanian maju, mandiri, modern serta menampilkan secara online tentang AWR. Sedangkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat memberikan materi tentang penyusunan Daftar informasi publik serta sharing informasi dalam pengelolaan PPID.

Bimtek ini juga difokuskan dalam pengelolaan portal PPID dimana petugas dan pejabat harus berkoordinasi dalam pengelolaan PPID. Pada bimtek ini diulang dan dipraktekkan secara langsung cara mengakses Portal PPID baik itu dari sisi pengguna layanan serta petugas dan pejabat layanan. Semua layanan informasi dianjurkan agar selalu lewat portal PPID agar setiap kegiatan layanan dapat dipantau dan layanan akan lebih efektif daripada pengguna layanan datang langsung ke kantor UK/UPT masing-masing. Dengan menggunakan portal PPID akan lebih bisa pilah mana informasi terbuka dan tertutup, serta petugas layanan akan lebih dipantau karena layanan dihitung berdasarkan waktu layanan.

Isi arahan kepala Biro HIP sebagai berikut : a) Menindaklanjuti telah ditandatanganinya berita acara komitmen antar eselon 1, maka perlu segera ditindaklanjuti dengan adanya penanda tangan komitmen pada setiap eselon 1 dengan setiap eselon 2 dibawahnya; b) Pengelolaan SDM dan ketersediaan Anggaran; c) Pengelolaan medsos terkontrol di PPID : setiap pegawai dapat ikut aktif tampilkan juga profesionalnya sebagai bagian pekerjaan untuk mensosialisasikan kegiatan dari kegiatan pertanian; d) Sarana & prasana yang wajib ada dan terpenuhi; e) Perlu inovasi : konter layanan PPID harus terhubung AWR (terintegrasi & terharmonisasi AWR) : TV layar sentuh terhubung AWR. Perlu antisipasi informasi yang tdk boleh dibuka; f) DIP update setiap tahun; g) Bisa bersinergi antar unit kerja; h) PPID Mektan menjadi PPID pelaksana bukan pembantu pelaksana lagi, menunggu SK terbaru 2020

Hasil diskusi sebagai berikut : a) Standardisasi sarana dan prasarana & pelayanan publik : juknis PPID akan diterbitkan tahun ini; b) Bimtek : diusulkan ada kunjungan ke PPID UK/UPT bagi peserta bimtek biar ada dampak lebih baik : ada kunjungan pada PPID terdekat; c) Kesulitan SDM di counter layanan serta perlu operator khusus AWR di setiap unit kerja; d) Juknis media sosial : informasi yg diupload & jumlah materi berita yag wajib diupload setiap hari maksimal 3 berita. Perlu pedoman dalam pengelolaan medsos dari

kementan. Informasi jgn mengaburkan informasi utama. Di UPT : berita disarankan lebih ke issue teknis level UK/UPT nya, ditambah berita dari ess2 dan ess 1 nya (merepost berita dari eselon di atasnya); e) LSM & perusahaan kalah tender membuat repot UK/UPT : perlu menginformasi secara jelas tentang prosedur yang harus dijalani oleh LSM ini; f) Dokumentasi & arsiparis : susah penelusuran arsip : akan ada aplikasi e-SIAP untuk kearsipan dari Biro Umum, akan disosialisasikan bareng dengan sosialisasi pelayanan publik oleh biro humas; g) Issue penting : Tim penilai dari Biro Humas, menanggapi rencana tidak adanya jabatan struktural maka bisa inpassing menjadi jabatan fungsional, klo jabatan sdh madya dapat ikut lelang jabatan eselon 2; h) Ada uji kompetensi bagi pranata humas dari struktural yang berubah ke jabatan fungsional. Madya. Fungsional Humas Madya bisa ada di eselon 2 lingkup Kementan; i) Permohonan Informasi apabila tanpa alasan jelas dapat ditolak berdasarkan peraturan Komisi Informasi Publik; j) Pedoman bermedia sosial pemerintah sdh ada sejak tahun 2016 : berdasarkan peraturan Kemeninfo, sehingga bisa dijadikan acuan; k) Perlu sosialisasi inpassing untuk pranata humas lingkup Kementan. Sedangkan Uji kompetensi dilaksanakan bulan agustus; l) Dalam penyusunan DIP setiap bidang/ bagian setiap UK/UPT diawali dengan mengidentifikasi dokumen yang mereka hasilkan; m) DIP dikirimkan ke eselon 1, dan ditembuskan ke PPID Pembina paling lambat bulan Maret 2022; n) Untuk pendokumentasian informasi & menghitung retensi perlu melibatkan arsiparis; o) Bisa mengundang untuk in house training dari biro humas apabila UK/UPT akan melakukan bimtek tersendiri pada setiap UK/UPT; p) Setiap UK/UPT dalam berkonsultasi langsung dengan LO masing-masing untuk konsultasi tentang pengelolaan PPID.



Gambar 12. Pelaksanaan kegiatan Bimtek PPID

10.2.2. Partisipasi dalam Bimtek Pengelolaan Informasi bagi Pejabat & Petugas Layanan via Vidcon, tanggal 27 April 2020

Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi secara virtual melalui video conference pada tanggal 27 April 2020 bersama 20 PPID UK/UPT lingkup Kementan. Acara diawali dengan kata pengantar oleh Kepala Bagian Umum Pengelolaan Informasi Publik, Komarudin dan sekaligus menjadi moderator diskusi bersama Kepala Biro Humas dan IP Kementan Kuntoro Boga Andri, S.P., M. Agr. Dalam arahannya, Kepala Biro menyampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh Komisi Keterbukaan Publik Kementan ditetapkan sebagai Badan Publik Informatif kluster tertinggi dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2019.

Bimtek bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Bimtek virtual PPID mendalami materi terkait menu pelayanan informasi publik (Silayan Online), menu database dokumen, menu transparansi kinerja dan penyusunan daftar informasi publik. Bimtek virtual dilaksanakan 2 sesi dalam sehari mulai tanggal 20 - 30 April 2020.

Kepala Bagian Umum Pengelolaan Informasi Publik menegaskan, "meski dalam masa pandemi, Kementan berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan informasi secara online melalui Silayan."

Hal ini sesuai dengan surat edaran dari komisi informasi pusat no 2 tahun 2020 tentang pelayanan informasi publik dalam masa darurat kesehatan masyarakat akibat corona virus disease 2019 (COVID-19) yaitu salah satunya adalah badan publik wajib memberikan pelayanan informasi publik dengan memaksimalkan pelayanan informasi berbasis daring (online).

PPID Utama melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi publik terhadap seluruh UPTnya. Terdapat perubahan kriteria pemeringkatan KIP lingkup kementerian pertanian yang pada tahun-tahun sebelumnya adalah peringkat 1,2 dan 3, pada tahun 2020 pemeringkatan diberikan dengan kriteria informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif .

Tahun 2019 kementan telah memperoleh predikat sebagai badan publik informatif. Diharapkan capain ini akan memotivasi UPT kementan untuk memberikan kategori yang sama sebagai badan publik informatif. PPID Utama Kementan terus berupaya mempertahankan kinerjanya menjadi badan publik informatif, minimal menuju informatif untuk seluruh UPTnya.



Gambar 13. Partisipasi dalam Bimtek Pengelolaan Informasi bagi Pejabat & Petugas Layanan via Vidcon

10.2.3. Partisipasi dalam Webinar Keterbukaan Informasi Publik, tanggal 5 Juni 2020

Di era teknologi informasi digital, masyarakat menuntut adanya transparansi atau keterbukaan informasi terkait kinerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian sebagai badan publik juga dituntut untuk dapat menyampaikan informasi secara sederhana, objektif dan responsif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

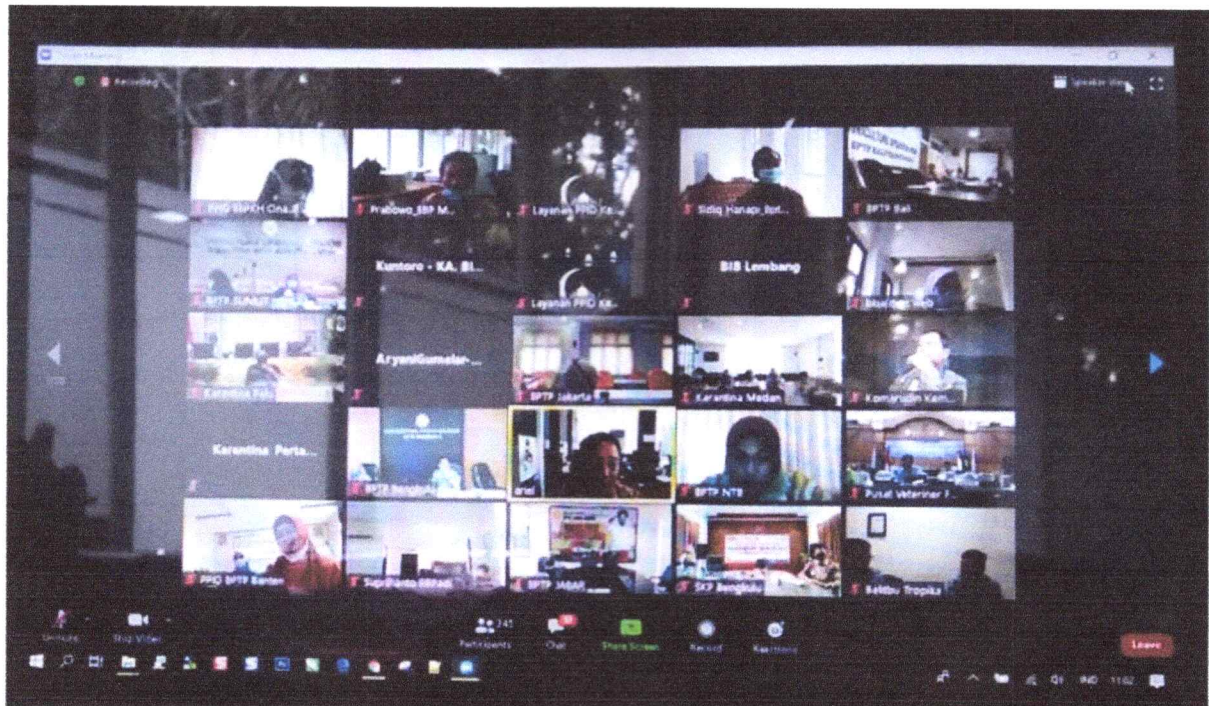
Hal ini disampaikan Koncoro Boga Andri, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian pada sambutan pembukaan acara seminar online (webinar) yang dilaksanakan, pada tanggal 5 Juni 2020 oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Utama Kementerian Pertanian.

Webinar diikuti secara online oleh 263 peserta dari seluruh perwakilan PPID Pelaksana Eselon 1, PPD Pelaksana UPT, dan PPID Pembantu Pelaksana di lingkup Kementerian Pertanian, termasuk di dalamnya perwakilan dari Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan).

Webinar yang diselenggarakan oleh PPID Utama kali ini, menghadirkan narasumber Hendra J kede, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP). Menurutnya PPID Utama di Kementerian Pertanian sebaiknya tetap dapat membangun dan memberikan informasi kepada publik sesuai dengan tugas dan fungsi Kementan, serta dapat mempertahankan peringkat sebagai Badan Publik Informatif seperti pada tahun 2019.

PPID Kementan sudah melakukan beberapa terobosan inovasi online untuk penyediaan informasi kepada publik seperti silayan dan sidado. Semuanya itu tentunya diperlukan juga dukungan oleh semua PPID lingkup Kementan (PPID Pelaksana Eselon 1, PPD Pelaksana UPT, dan PPID Pembantu Pelaksana). Sinergi pengelolaan informasi secara baik dan solid dengan PPID lingkup Kementan, salah satunya dapat dilakukan seperti pelaksanaan webinar kali ini, tambahnya.

Menanggapi ulasan Hendra J Kede ini, Kuntoro Boga Andri menginginkan PPID lingkup Kementan dapat menambah dan menghasilkan inovasi-inovasi berbasis online di bidang pertanian yang dapat dimanfaatkan oleh publik dalam mencari dan mendapatkan informasi



Gambar 14. Pelaksanaan Kegiatan Webinar KIP

10.2.4. Webinar Koordinasi dan Peningkatan Kinerja Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, tanggal 15 Juli 2020

Kementerian Pertanian melalui Biro Humas dan Informasi Publik (Biro HIP) selaku PPID Utama Kementan melaksanakan Webinar dengan tema "Inovasi Pelayanan Penyebaran Informasi Publik yang Cepat dan Tepat Berbasis Teknologi Informasi dengan narasumber Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Gede Narayana.

Webinar dilaksanakan selama 1 (satu) hari tanggal 15 Juli 2020, secara online melalui aplikasi **zoom meeting**. Kegiatan diikuti oleh Kepala Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup kementerian Pertanian. Pada kesempatan ini, BBP Mektan diwakili oleh Kepala BBP Mektan, Kabid KSPHP selaku ketua PPID serta Kasie PHP selaku pengelola PPID.

Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Momon Rusmono. Dalam sambutannya menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Biro Humas dan Informasi Publik karena telah memprakarsai kegiatan webinar ini. Webinar ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan peningkatan kinerja pengelolaan dan pelayanan informasi publik di masa Pandemi Covid-19.

Momon Rusmono menjelaskan bahwa sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik, Kementerian Pertanian sebagai badan publik telah mengimplementasikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Bahkan

tahun 2019 telah mendapatkan predikat sebagai Badan Publik Informatif. Predikat ini merupakan komitmen bersama seluruh Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pertanian, tambahanya.

Narasumber dari Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana, dalam paparannya menyampaikan bahwa Keterbukaan Informasi Publik di Era New Normal maka hal-hal yang harus diketahui publik antara lain : asas informasi publik, dasar hukum pelayanan publik, serta kebijakan dan aksi KIP pusat dalam situasi pandemi Covid-19.

Acara diakhiri dengan diskusi dengan peserta webinar, serta ditutup secara resmi oleh Kabag Umum Pengelolaan Informasi Publik, Biro HIP, Komarudin.



Gambar 15. Setjen Kementan pada saat membuka webinar

10.2.5. Penganugerahan KIP tahun 2020 lingkup Kementan, tanggal 15 September 2020

Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) raih peringkat IV tingkat eselon II lingkup Kementerian Pertanian. Dalam acara penganugerahan pemeringkatan keterbukaan informasi publik (KIP), Kementerian Pertanian tahun 2020, BBP Mektan juga meraih predikat sebagai unit kerja eselon II dengan kolaborasi penyebaran informasi publik terbaik.

Kepala BBP Mektan Agung Prabowo, setelah acara pemeringkatan memberikan apresiasi kepada Tim PPID BBP Mektan, serta mengharapkan agar hasil yang telah dicapai

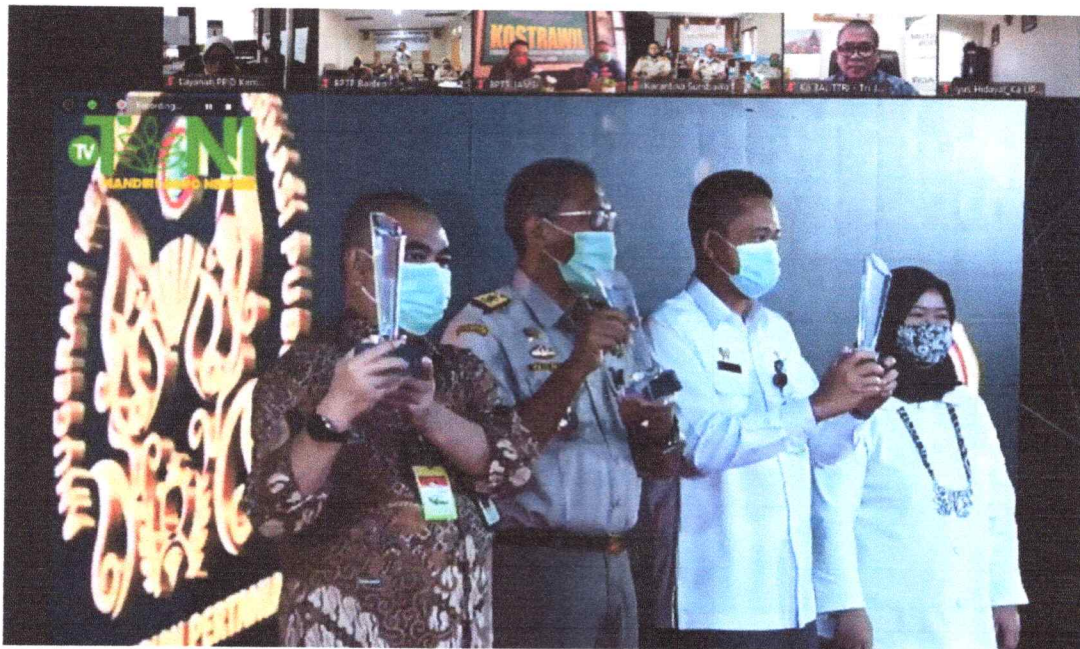
ini dapat memacu lebih giat untuk meningkatkan pelayanan publiknya, serta wajib berusaha terus terutama mewujudkan BBP Mektan sebagai Unit Kerja Informatif.

Kegiatan pemeringkatan KIP yang dilaksanakan Kementerian Pertanian sejak 2013 ini, merupakan ajang monitoring dan evaluasi untuk mengukur pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik tingkat Eselon 1, 2 dan 3 lingkup Kementerian Pertanian.

Dalam arahannya Mentan, Syarul Yasin Linpo (SYL), menyatakan bahwa PPID memiliki tanggung jawab untuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan terbuka, sehingga publik dapat berpartisipasi dalam pembangunan pertanian karena adanya legitimasi dan kepercayaan publik.

Mentan juga menegaskan bahwa dengan pengelolaan informasi publik yang baik, akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik, yang pada gilirannya memberikan kontribusi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian, dan tentunya dapat memberikan kemudahan akses setiap informasi program dan pelaksanaan pembangunan pertanian kepada publik.

Selain penganugerahan KIP, juga dilaksanakan penandatanganan komitmen Keterbukaan Informasi Publik oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sebagai bentuk keseriusan Kementerian Pertanian menuju pemerintahan yang transparan, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.



Gambar 16. Penyerahan Penghargaan Penganugerahan KIP Tahun 2020

10.2.6. Partisipasi dalam Webinar Keterbukaan Informasi Publik Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tanggal 9 Oktober 2020

Di era teknologi informasi digital ini, masyarakat mempunyai keinginan untuk lebih mengetahui kinerja lembaga dan kementerian secara transparan atau keterbukaan informasi terkait kinerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah salah satunya Kementerian Pertanian (Kementan). Sehubungan dengan itu, Kementerian Pertanian sebagai badan publik juga dituntut untuk dapat menyampaikan informasi secara sederhana, objektif dan responsif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PPID Utama Kementan bekerjasama dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) melaksanakan webinar keterbukaan informasi publik pengadaan barang dan jasa Pemerintah pada tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Sekjen Kementan), Momon Rusmono.

Sekjen Kementan, Momon Rusmono dalam arahannya menyampaikan harapannya dengan dilaksanakan webinar ini, para pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah dan PPID lingkup Kementan mendapatkan pemahaman yang benar tentang Informasi yang harus disediakan bagi masyarakat, khususnya informasi mengenai pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Mengingat bahwa saat ini ada sekitar 50 ribu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diseluruh UK/UPT ingkup Kementan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kegiatan Webinar menghadirkan 2 narasumber dari wakil ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Hendra J Kede, dengan materi tentang "Keterbukaan Informasi Publik Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", serta direktur Pengembangan System Pengadaan Secara Elektronik, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Emin Adhy Muhaemin, dengan materi tentang "Transparansi Sistem dan Manajemen Pengadaan Barang/ jasaPemerintah".

Emin Adhi Muhaemin, menjelaskan bahwa sesuai amanat Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pada pasal 5 mengamanatkan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, antara lain meliputi : melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Karena terbuka, maka pada pasal 22 disebutkan bahwa Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) K/L dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja, melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Dengan demikian, masyarakat akan mengetahui kegiatan pengadaan barang dan jasa yang direncanakan oleh masing-masing satuan kerja.

Webinar diikuti oleh 234 peserta, terdiri dari para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat pengadaan barang dan jasa Pemerintah serta pejabat PPID lingkup Kementan secara online. Point penting yang sama yang disampaikan dari kedua narasumber tersebut adalah, bahwa informasi yang dimiliki oleh setiap Kementerian dan Lembaga Pemerintah juga mempunyai kekuatan hukum dan dilindungi oleh hukum informasi keterbukaan publik.



Gambar 17. Pelaksanaan kegiatan Webinar KIP Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

XI. SDM dan Anggaran PPID

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di BBP Mektan, mulai dari penyiapan/pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik, telah dibentuk SK Tim PPID Pembantu Pelaksana berdasarkan surat keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian nomor SK Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Nomor : 38/Kpts/OT.080/H.9/01/2020, tanggal 2 Januari 2020, tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana lingkup Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian.

Selain SKP PPID dan SK petugas layanan, BBP Mektan juga telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) sesuai SK Kepala Balai Besar nomor : 2055/Kpts/OT.080/H.9/7/2019, tanggal 1 Juli 2019. Salah satu isi dalam SPP ini adalah menetapkan kompetensi dan jumlah pelaksana layanan.

Petugas layanan informasi publik di BBP Mektan adalah pranata humas, pejabat fungsional khusus, serta petugas dan staff yang ditunjuk dengan surat penugasan, yang mempunyai tugas menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik. Sebagian Tim ini juga juga merangkap sebagai tim pengelola TI, perpustakaan digital, dan Medsos serta dalam rangka mendiseminasikan hasil-hasil litbang mekanisasi pertanian.

Pengelolaan informasi publik berbasis internet, dengan alamat <http://www.mekanisasi.litbang.pertanian.go.id>, dikelola oleh Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Perekayasaan dan Pengujian. Dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di BBP Mektan, pejabat PPID Pembantu Pelaksana diharapkan tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di BBP Mektan sejak tahun 2018 telah mempunyai anggaran tersendiri. Kegiatan yang telah dilakukan terdiri dari pengadaan perlengkapan pengelolaan informasi publik, penyusunan/identifikasi informasi publik, sosialisasi pengelolaan informasi publik, pengumpulan bahan informasi publik, serta peningkatan kapasitas petugas SDM layanan publik serta monev pengelolaan informasi publik. Tahun 2020 telah tersedia dana sebesar Rp. 123.239.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan judul kegiatan : Pengembangan Teknologi Informasi, Perpustakaan Digital dan Pengelolaan Pelayanan Publik.

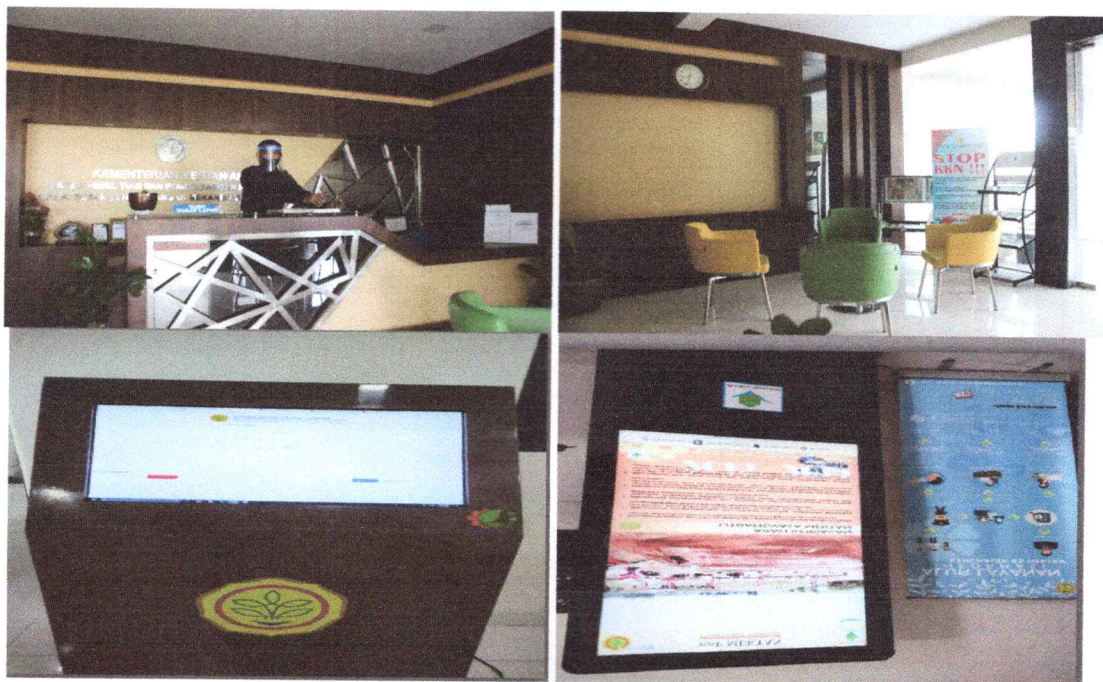
XII. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

BBP Mektan telah memberikan dukungan sarana dan prasarana pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi : ruang perpustakaan dilengkapi meja counter layanan perpustakaan, ruang baca & diskusi, komputer layanan pengunjung, rak leaflet/ bahan informasi, banner prosedur layanan perpustakaan, loker barang untuk pengunjung, AC dan free WIFI. Selain itu ruang server di ruang perpustakaan sudah terpisah dari ruangan staf dan ruang layanan perpustakaan, jadi tidak mengganggu layanan perpustakaan. Sejak Maret 2020, layanan perpustakaan sementara dihentikan dikarenakan masih dalam tahap renovasi sampai dengan sekarang.



Gambar 18. Banner Informasi penghentian layanan perpustakaan sementara karena adanya renovasi

Lobby kantor/ Ruang resepsionis BBP Mektan yang dilengkapi dengan sofa, bahan informasi/publikasi (buku dan leaflet teknologi mekanisasi pertanian), majalah, koran, SOP layanan dalam bentuk banner, Informasi layanan publik dalam LCD digital poster, TV LCD untuk informasi agenda kegiatan, TV digital layar sentuh untuk layanan online dan informasi tentang BBP Mektan, form2 layanan, jalur evakuasi dan lainnya.



Gambar 19. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik pada Area Lobby Kantor

Ruang konsultasi PPID disediakan khusus dilengkapi dengan sofa, bahan informasi/publikasi (buku dan leaflet teknologi mekanisasi pertanian), majalah, koran, SOP layanan dalam bentuk banner, jam layanan, kotak saran, kotak pengaduan, form2 layanan, computer, printer yang bisa untuk copy dan scanner dan telpon.



Gambar 20. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik pada Area ruang konsultasi

Ruang tunggu BBP Mektan telah dilengkapi dengan AC, sofa, bahan informasi/publikasi (buku dan leaflet teknologi mekanisasi pertanian), banner mendukung pengelolaan layanan informasi publik, Free WIFI, dan lainnya)



Gambar 21. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Pada Ruang Tunggu

Kawasan di lingkungan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana rambu-rambu serta penunjuk arah untuk memudahkan pengguna layanan antara lain : rambu kecepatan maksimum, titik kumpul, penunjuk arah gedung, serta tempat parkir.



Gambar 22. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Pada Kawasan BBP Mektan

Selain fasilitas di atas, BBP Mektan juga telah menambahkan fasilitas ruang laktasi dalam upaya mendukung pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

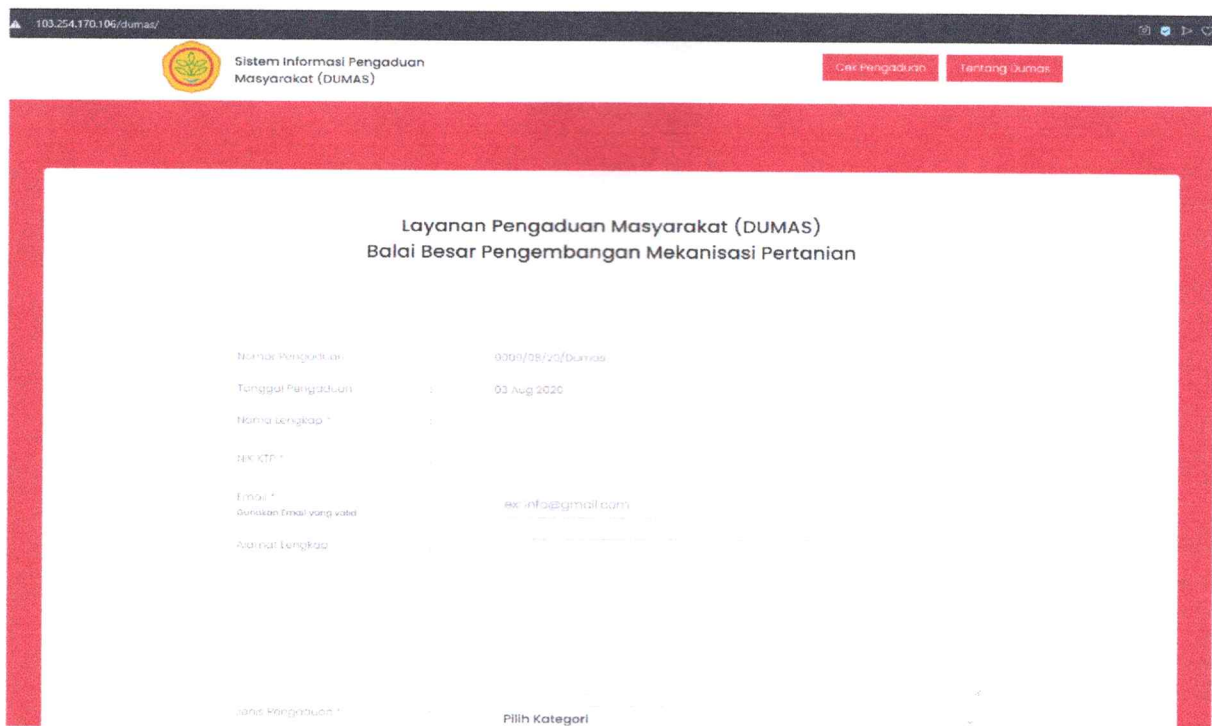


Gambar 23. Sarana Ruang Laktasi BBP Mektan

XIII. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi di Masing-masing Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis

Mulai tahun 2017 telah telah dirintis pembuatan pembuatan PORTAL Mekanisasi Pertanian dalam bentuk sistem informasi internal. Tahun 2020 sistem informasi yang masih dikembangkan dan disempurnakan meliputi : Sistem Informasi Kegiatan BBP Mektan, Sistem informasi alat dan mesin pertanian, Sistem layanan pengaduan masyarakat, pengelolaan perpustakaan sistem barcode, serta aplikasi layanan pengaduan masyarakat. Sistem informasi yang tersedia di dalam Portal Mekanisasi Pertanian yang sudah dilakukan pada tahun 2017 ini akan terus dilakukan pembaharuan untuk tiap tahun berjalannya kegiatan.

Beberapa hal yang dilakukan agar aplikasi ini dapat berjalan dan berfungsi dengan baik maka komitmen penangggung jawab dari aplikasi harus ditekankan agar aplikasi dapat secara kontineu update data dan selalu dilakukan penyempurnaan agar berfungsi lebih baik. Apabila aplikasi ini telah berfungsi dan dapat diapilksi dengan baik maka akan segera disosialisasikan kepada seluruh pegawai BBP Mektan agar dapat dimanfaatkan lebih optimal.



103.254.170.106/dumas/

Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (DUMAS)

Catat Pengaduan Tentang Dumas

Layanan Pengaduan Masyarakat (DUMAS)
Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian

Nama Pengaduan: 9399/08/20/dumas

Tanggal Pengaduan: 03 Aug 2020

Nama Pengaduan *

NIK/KTP *

Email *

Alamat Email yang valid

Alamat Pengaduan

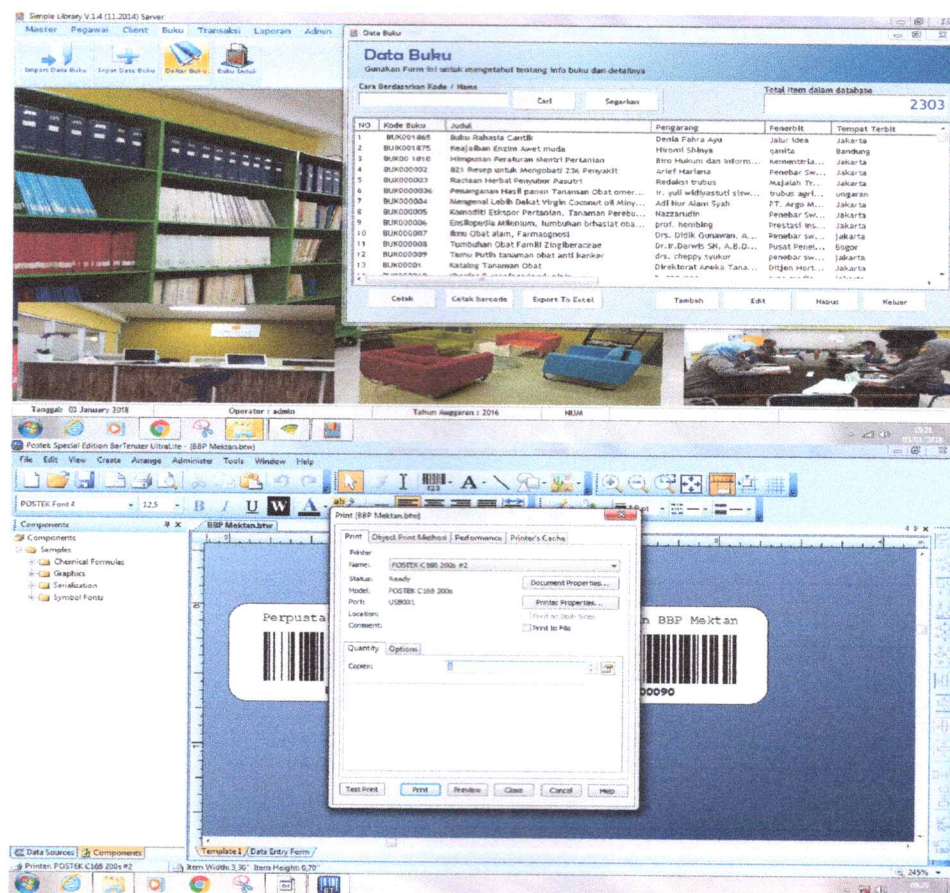
Jenis Pengaduan *

Pilih Kategori

Gambar 24. Sistem Layanan Pengaduan Masyarakat



Gambar 25. Sistem Layanan SIAP



Gambar 26. Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis Barcode

XIV. Penutup

Dalam pengelolaan dokumen publik di BBP Mektan sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana, dukungan pembiayaan serta pengelolaan *database* PPID internal perlu diubah ke sistem yang lebih efektif dan efisien, serta mudah dipahami oleh pengelola dan pelaksana.

Saran ke depan diharapkan pimpinan organisasi dan setiap bagian/bidang dalam suatu organisasi harus saling mendukung dan mempunyai komitmen bersama bahwa pelayanan publik adalah tugas bersama dalam suatu unit kerja, karena informasi publik berasal dari semua bagian/bidang dalam suatu unit kerja.

Tangerang, 13 Januari 2020

Ketua PPID,



Dr. Ir. Harsono, MP 
NIP. 19670211 199203 1 001